

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu, kerangka pendanaan dan pagu indikatif, dan urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Penyusunan dan Penetapan Renja Perangkat Daerah merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang didahului dengan penyusunan rancangan awal, forum SKPD dan Musrenbang sebagai wadah menampung aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD, sehingga dapat mewujudkan suatu perencanaan pembangunan yang partisipatif.

Mengawali persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah ini, telah dibentuk Tim Penyusun Renja Biro Umum yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat. Tim penyusun ini melaksanakan tugasnya mulai dari mengumpulkan data, menganalisis, menelaah dokumen yang diperlukan, sampai pada merumuskan dan menyusun dokumen Renja Biro Umum.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Biro Umum mempunyai arti penting dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2019.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Perangkat Daerah guna mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini mempedomani Rencana Strategis Biro Umum Tahun 2016-2020 Revisi Tahun 2018. Selanjutnya dokumen Renja ini akan diverifikasi oleh Bappeda melalui aplikasi e-Planning Sakato Plan.

1. 2 Landasan Hukum

Renja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk.I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

- Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2009 tentang Prosedur Pelayanan Tamu (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 Nomor 49);
 18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 69);
 20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 23);
 21. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor : 050/4936/SJ dan Nomor : 0430/M.PPN/12/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019; dan
 22. Surat Edaran Gubernur: 050/12/I/Ren.Makro/Bappeda-2019 Tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam menyusun program/kegiatan kebijakan umum anggaran (KUA) merencanakan program/kegiatan yang akan

dituangkan dalam RKA Biro Umum Tahun Anggaran 2020 serta mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan Tahun Anggaran 2020.

Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Biro Umum Tahun 2020 ini adalah sebagai bahan penyusunan RKPD Tahun 2020 yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RAPBD 2020.

1. 4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

Memuat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi, Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, serta Tabel rencana program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, Kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2. 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2018, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai 8 (delapan) program dan 42 (empat puluh dua) kegiatan sebagai berikut :

I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Kebersihan, pengamanan dan sopir kantor
4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
13. Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental
14. Penyediaan Makanan dan Minuman
15. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

1. Pengadaan Meubeleur
2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
7. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
8. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan
10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
11. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
12. Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas / Mess
13. Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan / Dinas / Mess
14. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas / Mess

III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
2. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
3. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

V. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
2. Penatausahaan Keuangan SKPD
3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

VI. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

1. Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah
2. Peringatan Hari-Hari Besar Nasional

VII. PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

1. Peningkatan Pelayanan Keprotokolan
2. Rakor Keprotokolan

VIII. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

1. Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Pemakaian Istana Bung Hatta
2. Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Pemakaian Gedung Rohana Kudus

Alokasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan tersebut bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018, dengan total pagu sebesar **Rp. 48.436.908.711,-** pada anggaran murni dan menjadi **Rp. 65.472.125.525,-** pada perubahan anggaran, dengan realisasi sebesar **Rp. 58.094.883.251,- (87,66%)**. Rincian realisasi anggaran belanja langsung Biro Umum Tahun Anggaran 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran Belanja Langsung TA. 2018

PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	28.688.272.296	24.140.746.469	84%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	646.260.347	494.858.308	76,57%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	3.118.200.000	2.723.452.612	87,34%
Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	6.327.059.683	6.106.392.584	96,51%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.621.380.000	2.485.588.200	94,82%
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	658.550.880	617.973.733	93,84%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	285.352.725	266.558.150	93,41%
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	387.519.600	378.942.600	97,79%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	90.011.250	88.227.000	98,02%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.030.130.000	2.530.633.000	83,52%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	49.000.000	49.000.000	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	108.620.000	108.618.750	100%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	10.766.159.211	7.792.755.662	72,38%
Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental	340.458.600	316.446.000	92,95%
Penyediaan Makanan dan Minuman	84.570.000	46.675.000	55,19%

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	175.000.000	134.624.870	76,93%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	34.776.530.640	27.992.977.560	91%
Pengadaan Meubelier	688.725.000	527.118.900	76,54%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	179.713.994	122.078.733	67,93%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	1.004.567.000	982.193.500	97,77%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	982.760.750	902.329.318	91,82%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Peralatan / Perlengkapan Kantor	321.735.616	258.904.100	80,47%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	49.500.000	9.753.000	19,7%
Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD	487.244.413	473.126.890	97,1%
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	4.227.326.000	3.551.031.600	84%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Instalasi dan Jaringan	289.333.586	168.130.745	58,11%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	370.350.000	308.186.360	83,21%
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	4.457.000.000	4.236.919.364	95,06%
Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas / Mess	3.801.093.289	3.708.388.710	97,56%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan / Dinas / Mess	958.300.000	948.308.000	98,96%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas / Mess	209.450.000	161.900.360	77,3%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	846.546.500	799.980.875	94%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	658.246.500	626.614.275	95,19%
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	70.050.000	55.791.600	79,65%
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	118.250.000	117.575.000	99,43%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	216.605.000	117.984.067	54,47%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	216.605.000	117.984.067	54,47%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.023.165.250	854.023.768	83%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	123.024.900	105.039.400	85,38%

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran / tahunan	774.918.350	650.979.168	84,01%
Penatausahaan Keuangan SKPD	125.222.000	98.005.200	78,27%
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	13.407.418.586	13.035.634.604	97%
Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah	12.638.955.686	12.315.389.304	97,44%
Peringatan Hari-hari Besar Nasional	768.462.900	720.245.300	93,73%
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.135.873.129	1.716.036.729	80%
Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Istana Bung Hatta	1.258.494.041	1.014.752.800	80,63%
Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Gedung Rohana Kudus	877.379.088	701.283.929	79,93%
Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Mess Bukit Lampu	738.883.864	-	-
JUMLAH TOTAL	65.472.125.525	58.094.883.251	87,66%

- **Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.**

Pada pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2018, terdapat **13 (tiga belas) kegiatan** yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan yang direncanakan, yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, jumlah dana Rp. 646.260.347,- realisasi sebesar Rp. 494.858.308,- (76,57%). Rendahnya serapan anggaran karena efisiensi/sisa perjalanan dinas mengantarkan undangan/surat Pimpinan ke Kabupaten/Kota.
- 2) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah, jumlah dana Rp. 10.766.159.211,- realisasi sebesar Rp. 7.792.755.662,- (72,38%). Rendahnya serapan anggaran disebabkan sisa dari anggaran perjalanan dinas Luar Negeri Pimpinan yang tidak jadi dilaksanakan.
- 3) Penyediaan Makanan dan Minuman, jumlah dana Rp. 84.570.000,- realisasi sebesar Rp. 46.675.000,- (55,19%). Rendahnya serapan anggaran karena berdasarkan kebutuhan pelaksanaan rapat.

- 4) Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, jumlah dana Rp. 175.000.000,- realisasi sebesar Rp. 134.624.870,- (76,93%). Rendahnya serapan anggaran karena pembayaran jasa lembaga kesehatan guna pemeriksaan kesehatan (*medical check-up*) KDH dan WKDH dalam satu tahun ini tidak banyak digunakan. Serapan kegiatan ini tidak dapat diprediksi maupun dikontrol karena sangat tergantung dengan kebutuhan *check-up* kesehatan Pimpinan.
- 5) Pengadaan Meubeleur, jumlah dana Rp. 688.725.000,- realisasi sebesar Rp. 527.118.900,- (76,54%). Rendahnya serapan anggaran karena sisa tender pengadaan meubeleur kantor.
- 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi, jumlah dana Rp. 179.713.994,- realisasi sebesar Rp. 122.078.733,- (67,93%). Rendahnya serapan anggaran karena banyak BMD yang direncanakan untuk diservice tidak dapat dilakukan karena akan diusulkan penghapusannya serta kebutuhan BMD tersebut telah ada ganti dengan pengadaan baru.
- 7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi, jumlah dana Rp. 49.500.000,- realisasi sebesar Rp. 9.753.000,- (19,70%). Rendahnya serapan anggaran karena banyak komputer yang akan dilakukan penghapusan BMD dengan adanya pengadaan komputer baru.
- 8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan, jumlah dana Rp. 289.333.586,- realisasi sebesar Rp. 168.130.745,- (58,11%). Rendahnya serapan anggaran karena kesulitan dalam mendapatkan SDM atau Petugas Teknis yang ahli dibidang Lift, Listrik dan AC, sehingga terjadi sisa anggaran Honorarium non PNS.
- 9) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess, jumlah dana Rp. 209.450.000,- realisasi sebesar Rp. 161.900.360,- (77,30%). Rendahnya realisasi

anggaran disebabkan menyesuaikan dengan kebutuhan Rumah Dinas Pimpinan seperti kebutuhan Laundry, dan lain-lain.

- 10) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, jumlah dana Rp. 70.050.000,- realisasi sebesar Rp. 55.791.600,- (79,65%). Rendahnya serapan anggaran disebabkan pembatasan peruntukan pakaian khusus untuk pramusaji dan petugas pelayanan tamu dan pimpinan.
 - 11) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, jumlah dana Rp. 216.605.000,- realisasi sebesar Rp. 117.984.067,- (54,47%). Rendahnya serapan anggaran karena menyesuaikan undangan kegiatan Bimtek yang resmi dari instansi pemerintah terkait.
 - 12) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, jumlah dana Rp. 125.222.000,- realisasi sebesar Rp. 98.005.200,- (78,27%). Rendahnya serapan anggaran disebabkan sisa perjalanan dinas kegiatan Rekon yang sedianya dilaksanakan di Bukittinggi namun terlaksana di Kota Padang.
 - 13) Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Gedung Rohana Kudus, jumlah dana Rp. 877.379.088,- realisasi sebesar Rp. 701.283.929,- (79,93%). Rendahnya serapan karena sisa pengadaan kursi kebutuhan gedung yang dapat efisiensi dalam pelaksanaannya.
- **Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.**

29 (dua puluh sembilan) kegiatan lainnya telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai yang direncanakan. Dari 29 kegiatan tersebut, terdapat **15 (lima belas)** kegiatan yang penyerapan anggarannya dibawah **95%**. Namun demikian, tidak begitu mempengaruhi pencapaian target hasil/keluaran berdasarkan indikator yang telah ditetapkan untuk masing-masing kegiatan, karena secara

fisik kegiatan tersebut telah terpenuhi. 15 (lima belas) kegiatan dimaksud berikut penjelasannya dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik, jumlah dana Rp. 3.118.200.000,- realisasi sebesar Rp. 2.723.452.612,- (87,34%). Serapan anggaran rendah disebabkan Belanja Telepon, Air dan Listrik sesuai dengan tagihan pemakaian bulanan. Secara fisik realisasi menunjukkan 100% karena kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik kantor dapat terpenuhi.
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, jumlah dana Rp.2.621.380.000,- realisasi sebesar Rp.2.485.588.200,- (94,82%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan sisa pengadaan BMD yang diefisiensikan. Secara fisik realisasi menunjukkan 100% karena kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor dapat terpenuhi.
- 3) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, jumlah dana Rp.658.550.880,- realisasi sebesar Rp.617.973.733,- (93,84%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan pembayaran premi asuransi menyesuaikan dengan banyaknya BMD yang telah dihapuskan. Secara fisik realisasi menunjukkan 100% karena kebutuhan pembayaran premi semua BMD dapat terpenuhi.
- 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor, jumlah dana Rp.285.352.725,- realisasi sebesar Rp.266.558.150,- (93,41%). Serapan anggaran belum mencapai target karena menyesuaikan dengan kebutuhan alat tulis kantor yang difasilitasi. Secara fisik realisasi menunjukkan 100% karena kebutuhan alat tulis kantor dapat terpenuhi.
- 5) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, jumlah dana Rp.3.030.130.000,- realisasi sebesar Rp.2.530.633.000,- (83,52%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan pemakaian sewa tenda, kursi dan meja menyesuaikan dengan acara yang dilakukan di lingkungan Biro Umum. Secara fisik realisasi menunjukkan 100% karena jasa penyewaan peralatan dan perlengkapan kantor dapat terpenuhi.

- 6) Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental, jumlah dana Rp. 340.458.600,- realisasi sebesar Rp.316.446.000,- (92,95%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan karena menyesuaikan pelaksanaan senam pada bulan Ramadhan ditiadakan.
- 7) Penyediaan Makanan dan Minuman, jumlah dana Rp. 147.750.000,- realisasi sebesar Rp.80.420.000,- (54,43%). Serapan anggaran cukup rendah disebabkan karena menyesuaikan dengan kebutuhan rapat-rapat pimpinan dan biro.
- 8) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, jumlah dana Rp. 1.465.620.000,- realisasi sebesar Rp.1.277.420.000,- (87,16%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan Secara fisik pengadaan kendaraan dinas telah dilakukan 100% namun realisasi dipengaruhi sisa belanja/tender pengadaan tersebut.
- 9) Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas/Mess, jumlah dana Rp.3.272.492.483,- realisasi sebesar Rp.3.064.742.349,- (93,65%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan efisiensi pengadaan barang/jasa atau sisa pengadaan kebutuhan Rumah Dinas. Secara fisik realisasi menunjukkan 100% karena kebutuhan peralatan rumas jabatan/dinas/mess dapat terpenuhi.
- 10) Pengadaan Meubelair, Jumlah dana Rp.850.000.000,- realisasi sebesar Rp.616.855.897,- (72,57%). Serapan anggaran rendah karena Sisa tender pengadaan meubeliur kantor.
- 11) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, jumlah dana Rp. 5.228.548.750,- realisasi sebesar Rp.4.046.658.000,- (77,40%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan secara fisik pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor telah dilakukan 100% namun realisasi 77,40% karena sisa belanja/tender pengadaan tersebut.
- 12) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, jumlah dana Rp.549.160.000,- realisasi sebesar Rp.500.481.700,- (91,14%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan

pemeliharaan gedung kantor disesuaikan dengan kondisi gedung tersebut.

- 13) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan, Jumlah Dana Rp.347.900.000,- realisasi sebesar Rp.264.902.284,- (76,14%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan belanja pemeliharaan disesuaikan dengan keadaan mobil jabatan yang akan dilakukan pemeliharaan.
- 14) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Jumlah Dana Rp.956.026.350,- realisasi sebesar Rp.658.090.019,- (68,84%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan Belanja pemeliharaan disesuaikan dengan keadaan kendaraan dinas / operasional yang akan dilakukan pemeliharaan.
- 15) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess, Jumlah Dana Rp.220.950.000,- realisasi sebesar Rp.161.021.900,- (72,88%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan belanja pemeliharaan peralatan / perlengkapan rumah jabatan / dinas / mess disesuaikan dengan kebutuhannya.
- 16) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Jumlah Dana Rp.173.397.500,- realisasi sebesar Rp.125.998.650,- (72,66%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan belanja pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor disesuaikan dengan keadaan di kantor.
- 17) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, jumlah dana Rp.20.812.657.075,- realisasi sebesar Rp.16.835.613.446,- (80,89%). Rendahnya serapan anggaran karena sisa tender rehabilitasi sedang / berat gedung kantor.
- 18) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi, jumlah dana Rp.170.255.744,- realisasi sebesar Rp.83.246.781,- (48,90%). Serapan anggaran tidak mencapai

target disebabkan pemeliharaan alat studio, alat komunikasi dan alat informasi disesuaikan dengan kondisi peralatan tersebut.

- 19) Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi, jumlah dana Rp.22.200.000,- realisasi sebesar Rp.13.025.000,- (58,67%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan belanja pemeliharaan rutin / berkala komputer dan jaringan komputerisasi disesuaikan dengan keadaan komputer.
- 20) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya, Jumlah dana Rp.548.400.200,- realisasi sebesar Rp.505.398.040,- (92,16%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan sisa realisasi pengadaan/tender pakaian kerja lapangan.
- 21) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Jumlah dana Rp.70.200.000,- realisasi sebesar Rp.37.260.000,- (53,08%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan sisa realisasi pengadaan pakaian kerja lapangan.
- 22) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, Jumlah dana Rp.226.500.000,- realisasi sebesar Rp.177.017.500,- (78,15%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan Sisa realisasi pengadaan pakaian Hari-hari tertentu.
- 23) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, jumlah dana Rp.147.528.000,- realisasi sebesar Rp.105.075.980,- (71,22%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan realisasi kegiatan Bimtek disesuaikan dengan surat undangan untuk mengikuti Bimtek peraturan perundang-undangan.
- 24) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/Tahunan, jumlah dana Rp.49.255.600,- realisasi sebesar Rp.42.192.200,- (85,66%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan efisiensi dan menyesuaikan kebutuhan.
- 25) Penatausahaan Keuangan SKPD, jumlah dana Rp.255.777.950,- realisasi sebesar Rp.230.159.550,- (89,98%). Serapan anggaran

tidak mencapai target disebabkan efisiensi dan menyesuaikan kebutuhan.

- 26) Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD, jumlah dana Rp.97.914.400,- realisasi sebesar Rp.81.578.250,- (83,32%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan efisiensi dan menyesuaikan kebutuhan.
- 27) Peringatan Hari-Hari Besar Nasional, jumlah dana Rp.697.312.900,- realisasi sebesar Rp.632.994.376,- (90,78%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan efisiensi dan menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan hari besar nasional.
- 28) Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Istana Bung Hatta, jumlah dana Rp.796.451.816,- realisasi sebesar Rp.413.730.222,- (51,95%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan sesuai dengan keadaan pemakaian Istana Bung Hatta dan dengan adanya proyek pekerjaan fisik yang menyebabkan pemakaian kamar penginapan tidak terlaksana.
- 29) Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Gedung Rohana Kudus, jumlah dana Rp.531.502.626,- realisasi sebesar Rp.461.478.768,- (86,83%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan sesuai dengan keadaan pemakaian Gedung Rohana Kudus.
- 30) Peningkatan Pelayanan Keprotokolan, jumlah dana Rp.755.492.472,- realisasi sebesar Rp.671.504.349,- (88,88%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan efisiensi dan menyesuaikan banyaknya acara dan pelayanan Pimpinan.
- 31) Rakor Keprotokolan, jumlah dana Rp.87.931.600,- realisasi sebesar Rp.54.476.400,- (61,95%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan sisa realisasi kegiatan Rakor Keprotokolan.

- **Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.**

Dari 41 kegiatan yang telah memenuhi target hasil/keluaran, terdapat **14 (empat belas)** kegiatan yang penyerapan anggarannya melebihi target yang ditetapkan **95%**.

- 1) Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor, jumlah dana Rp.6.327.059.683,- realisasi sebesar Rp.6.106.392.584,- (96,51%). Serapan anggaran melebihi target karena memenuhi kebutuhan upah atau biaya jasa Cleaning Service dan Security Kantor.
- 2) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, jumlah dana Rp. 387.519.600,- realisasi sebesar Rp. 378.942.600,- (97,79%). Serapan anggaran melebihi target karena banyaknya kebutuhan cetak undangan Pimpinan/VIP.
- 3) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, jumlah dana Rp. 90.011.250,- realisasi sebesar Rp. 88.227.000,- (98,02%). Serapan anggaran melebihi target karena cukup banyak penyediaan barang kebutuhan instalasi listrik kantor.
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, jumlah dana Rp. 49.000.000,- realisasi sebesar Rp. 49.000.000,- (100%). Serapan anggaran melebihi target karena memenuhi kebutuhan bahan bacaan/buku-buku untuk Pimpinan.
- 5) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, jumlah dana Rp.108.620.000,- realisasi sebesar Rp.108.618.750,- (100%). Serapan anggaran melebihi target karena permintaan kebutuhan bahan pembersih ruangan kantor cukup tinggi per bulannya.
- 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, jumlah dana Rp.1.004.567.000,- realisasi sebesar Rp.982.193.500,- (97,77%). Serapan anggaran melebihi target karena menyesuaikan banyaknya kebutuhan pemeliharaan gedung.
- 7) Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD, jumlah dana Rp. 487.244.413,- realisasi sebesar Rp. 473.126.890,-

- (97,10%). Serapan anggaran melebihi target karena memenuhi kebutuhan honorarium PNS pengelola asset SKPD.
- 8) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, jumlah dana Rp. 4.457.000.000,- realisasi sebesar Rp. 4.236.919.364,- (95,06%). Serapan anggaran melebihi target karena menyesuaikan harga kendaraan untuk dinas yang berlaku.
 - 9) Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess, jumlah dana Rp. 3.801.093.289,- realisasi sebesar Rp. 3.708.388.710,- (97,56%). Serapan anggaran melebihi target karena memenuhi kebutuhan rumah dinas Pimpinan yang cukup tinggi.
 - 10) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas/Mess, jumlah dana Rp.958.300.000,- realisasi sebesar Rp.948.308.000,- (98,96%). Serapan anggaran melebihi target karena telah sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan yang cukup banyak.
 - 11) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, jumlah dana Rp.658.246.500,- realisasi sebesar Rp.626.614.275,- (95,19%). Serapan anggaran melebihi target karena menyesuaikan dengan hasil tender pengadaan pakaian dinas.
 - 12) Pengadaan Pakaian Dinas Khusus Hari-hari Tertentu, jumlah dana Rp.118.250.000,- realisasi sebesar Rp.117.575.000,- (99,43%). Serapan anggaran melebihi target karena telah sesuai dengan kebutuhan pakaian pimpinan yang cukup banyak.
 - 13) Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah, jumlah dana Rp.12.638.955.686,- realisasi sebesar Rp.12.315.389.304,- (97,44%). Serapan anggaran melebihi target karena telah sesuai dengan kebutuhan tamu yang cukup banyak berkunjung ke Sumatera Barat.
 - 14) Peningkatan Pelayanan Keprotokolan, jumlah dana Rp.1.066.788.516,- realisasi sebesar Rp.1.023.798.859,- (95,97%). Serapan anggaran melebihi target karena telah sesuai dengan tingginya kebutuhan pelayanan tamu dan pimpinan.

- **Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan.**

- Tidak tercapainya target kinerja keluaran 13 kegiatan dimaksud, diantaranya adalah menyesuaikan dengan kebutuhan Pimpinan, kebutuhan rapat-rapat yang terselenggara, adanya penghapusan BMD yang diluar perkiraan, serta sisa lebih tender dan/atau pengadaan BMD.
- Terpenuhinya target hasil/keluaran 29 kegiatan lainnya, disebabkan faktor perbaikan proses perencanaan, perbaikan fungsi pengendalian oleh pelaksana kegiatan, serta komitmen terhadap efisiensi belanja barang/jasa.

- **Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah.**

Akibat dari 13 (tiga belas) kegiatan yang tidak mencapai target serapan anggaran tersebut sedikit mempengaruhi capaian Renstra Biro Umum (pencapaian tujuan dan sasaran strategis). Pada Indikator Kinerja Utama “Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan” tidak mencapai target yang diharapkan yaitu 95%. Namun pada indikator kinerja lainnya tidak begitu terpengaruh karena rendahnya serapan anggaran lebih disebabkan penyesuaian kebutuhan, sedangkan target hasil/keluaran dari setiap program/kegiatan dapat dipenuhi.

- **Kebijakan/Tindakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab tersebut.**

Langkah yang perlu dilakukan mengatasi hal tersebut adalah mereview dan menyesuaikan kembali jumlah belanja anggaran kegiatan yang lebih sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan yang dapat diprediksi. Sedangkan kebutuhan belanja rutin/tidak rutin yang sulit diprediksi perlu tetap dianggarkan dengan mempertimbangkan trend realisasi tahun lalu.

Tindakan lainnya yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki proses perencanaan anggaran yang lebih baik lagi, dengan cara memperoleh data-data yang lebih akurat dengan didukung dokumen yang lebih lengkap. Serta diperlukan juga komitmen dari pelaksana kegiatan dan rekanan untuk selalu menjaga integritas dan prinsip efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang didukung dengan sistem pengendalian yang baik.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Tahun 2016
Provinsi Sumatera Barat

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Perangkat Daerah) TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (2018)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN				
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2019	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)*	11 = (10/4)			
4.00													
	FUNGSI LAINNYA												
4.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya Surat Menyurat	7800 buah	1450	1500	1506	100%	1550	4506	58%
4.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik dan Telepon Kantor	12 bulan	12	12	12	100%	12	12	100%
4.00	01	01	03	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor, Jasa Pengamanan Kantor dan Jasa Sopir	8 unit/12 bulan, 27 orang/12 bulan	8 unit/12 bulan, 27orang/12 bulan	75 Satpam, 27 Sopir, 6 unit Gedung/12 bulan	75 Satpam, 27 Sopir, 6 unit Gedung/12 bulan	100%	8 unit/12 bulan, 27orang/12 bulan	8 unit/12 bulan, 27orang/12 bulan	100%

4.00	01	01	04	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	92	item	-	Kursi Roda 2 unit, Komputer 4 unit, Hand Mic 2 bh, Tonggak Mic+Kabel, Sound System 1 paket, Wireles Portabel 1 unit, Mic Wireles 2 set	Kursi Roda 2 unit, Komputer 4 unit, Hand Mic 2 bh, Tonggak Mic+Kabel, Sound System 1 paket, Wireles Portabel 1 unit, Mic Wireles 2 set	100%	7	20	22%
4.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pembayaran PBB dan Premi Asuransi Barang Milik Daerah	71	unit/12 bulan	65	7 unit bangunan/12 bulan dan 57 unit kendaraan dinas operasional	7 unit bangunan/12 bulan dan 57 unit kendaraan dinas operasional	100%	67	67	94%
4.00	01	01	08	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	1	tahun	1	1	1	100%	1	1	100%
4.00	01	01	09	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	tahun	1	1	1	100%	1	1	100%
4.00	01	01	10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1	tahun	1	1	1	100%	1	1	100%
4.00	01	01	11	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	bulan	12	50 tabung pemadam kebakaran, 1 tahun sewa peralatan dan perlengkapan kantor	50 tabung pemadam kebakaran, 1 tahun sewa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	12	12	100%
4.00	01	01	13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	2	jenis	2	1	1	100%	2	2	100%

4.00	01	01	14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Logistik Kantor untuk Ruangan Pimpinan	12	bulan	12	12	12	100%	12	12	100%
4.00	01	01	15	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	1	tahun	1	1	1	100%	1	1	100%
4.00	01	01	18	Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Terlaksananya Senam Pagi setiap Minggu di Lingkungan Kantor Gubernur	12	bulan	0	12	12	100%	12	12	100%
4.00	01	01	24	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Makanan dan Minuman untuk rapat	540	kali	120	12	12	100%	130	142	26%
4.00	01	01	302	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	tahun	1	2 orang/12 bulan	2 orang/12 bulan	100%	1	1	100%
4.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.00	01	02	01	Pengadaan Meubeleur	Jumlah meubeleur gedung Kantor	60	item	14	Kursi rapat, Sofa tamu, Kursi pimpinan rapat, Meja untuk pelantikan, Meja resepsionis + rak	Kursi rapat, Sofa tamu, Kursi pimpinan rapat, Meja untuk pelantikan, Meja resepsionis + rak	100%	5	19	32%
4.00	01	02	04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	12	bulan	12	12	12	100%	12	12	100%
4.00	01	02	05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	42	unit	7	1	1	100%	6	7	17%

4.00	01	02	06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	321 unit	63	57 Unit Roda 4, 20 Unit Roda 2, Kendaraan Operasional PKK, BKOW dan P2TP2A, Bundo Kandung	57 Unit Roda 4, 20 Unit Roda 2, Kendaraan Operasional PKK, BKOW dan P2TP2A, Bundo Kandung	100%	81	225	70%
4.00	01	02	07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 jenis	12 bulan	12	12	100%	3	3	25%
4.00	01	02	09	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	12 bulan	12	12	12	100%	12	12	100%
4.00	01	02	11	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD	Terlaksananya Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	5 orang / 12 bulan	5	1	1	100%	-	1	20%
4.00	01	02	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	30 unit	5	Rehab sedang / Berat Gedung Kantor	Rehab sedang / Berat Gedung Kantor	100%	5	10	33%
4.00	01	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Instalasi dan Jaringan	12 bulan	12	12	12	100%	12	12	100%
4.00	01	02	29	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	50 unit	10	10	10	100%	10	20	40%
4.00	01	02	37	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	29 unit	8	3 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraan roda 3	3 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraan roda 3	100%	4	16	55%
4.00	01	02	43	Pengadaan peralatan/perlengkapan rumah jabatan/dinas/mess	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas / Mess	56 jenis	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	14	14	25%

4.00	01	02	55	Pemeliharaan rutin/berkala rumah Jabatan/Dinas/Mess	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	12	unit	-	12	12	100%	3	3	25%	
4.00	01	02	62	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan rumah jabatan/dinas/mess	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas / Mess	12	bulan	12	12	12	100%	12	12	100%	
4.00	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.00	01	03	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	3696	stel	616	Pakaian Dinas KDH/WKDH, PSH, PDH, PDU, PSL	Pakaian Dinas KDH/WKDH, PSH, PDH, PDU, PSL	100%	616	1232	33%	
4.00	01	03	11	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	545	stel	85	95	95	100%	85	265	49%	
4.00	01	03	12	Pengadaan Pakaian Dinas Khusus Hari-Hari Tertentu	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	383	stel	45	18 Stel Pakaian Batik / Tenun Tradisional, 27 Stel Pakaian Olahraga, 4 stel Pakaian Korpri	18 Stel Pakaian Batik / Tenun Tradisional, 27 Stel Pakaian Olahraga, 4 stel Pakaian Korpri	100%	49	143	37%	
4.00	01	04		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terpenuhinya peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.00	01	04	01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	166	orang	1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	34	34	20%	
4.00	01	05		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.00	01	05	01	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	3	dokumen	3	DPA, Pergeseran, DPPA	DPA, Pergeseran, DPPA	100%	-	3	100%	

4.00	01	05	02	Penatausahaan Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan SKPD	100 orang / 12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	25	25	25%
4.00	01	05	03	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	28 dokumen	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	7	7	25%
4.00	01	158		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN	Terpenuhinya penyediaan jasa pelayanan tamu pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.00	01	158	01	Penyediaan jasa pelayanan tamu pemerintah daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah	114,000 orang	26,000	12 Bulan	12 Bulan	100%	27,000	53,000	46%
4.00	01	158	03	Peringatan hari-hari besar nasional	Terlaksananya Peringatan Hari-hari Besar Nasional	42 hari besar nasional	7	Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional, Hari Proklamasi, Hari Kesaktian Pancasila, Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, HUT PDRI	Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional, Hari Proklamasi, Hari Kesaktian Pancasila, Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, HUT PDRI	100%	7	21	50%
4.00				FUNGSI LAINNYA									
4.00	01	180		PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat pelayanan keprotokolan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.00	01	180	01	Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	64 orang / 12 bulan	16	12 Bulan	12 Bulan	100%	16	48	75%
4.00	01	180	06	Rakor Keprotokolan	Terlaksananya Rakor Keprotokolan	292 orang	60	1 kali	1 kali	100%	60	180	62%

3.00	03			PENUNJANG KEUANGAN									
3.00	03	185		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat pengelolaan keuangan daerah pada unit SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.00	03	185	01	Intensifikasi penerimaan retribusi pengelolaan Istana Bung Hatta	Terlaksananya Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Istana Bung Hatta	12 bulan	12	12	12	100%	12	12	100%
3.00	03	185	02	Intensifikasi penerimaan retribusi pengelollan Gedung Rohana Kudus	Terlaksananya Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Gedung Rohana Kudus	12 bulan	12	12	12	100%	12	12	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Biro Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya tidak mengampu salah satu SPM untuk urusan wajib maupun indikator kinerja kunci seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sebagai unit pendukung (*supporting unit*) pada Sekretariat Daerah sesuai program prioritas pembangunan yang telah dijabarkan dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Biro Umum melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi umum pemerintahan atau fungsi penunjang, antara lain : pelayanan tamu dan pelayanan pimpinan serta beberapa program urusan yang berkaitan dengan **Misi ke-2 RPJMD “Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional”**. pada *Tujuan Ketiga* “Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima, Transparan, Aspiratif, dan Partisipatif”, *Sasaran Pertama* “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”, dengan Indikator Kinerja “Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat”.

Untuk menentukan tolak ukur keberhasilan pelayanan Perangkat Daerah perlu dirumuskan indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah. Biro Umum sesuai dengan Renstra Perubahan telah merumuskan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk menilai keberhasilan kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2016 sampai dengan 2021.

Indikator Kinerja Utama Biro Umum dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagaimana berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Biro Umum Tahun 2016 – 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kepuasan <i>Stakeholders</i> di bidang Pelayanan Tamu dan Pelayanan Pimpinan	IKM Pelayanan Tamu	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		IKM Pelayanan Pimpinan	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
2	Meningkatnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang Baik	% Sarana dan Prasarana yang Berkualitas Baik	83%	85%	87%	89%	91%	93%
3	Terwujudnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	BB	BB	BB
		% Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan	95%	95%	95%	95%	95%	95%

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Biro Umum
Provinsi Sumatera Barat

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	I K K	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	IKM Pelayanan Tamu	-	-	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik			Sangat Baik	Sangat Baik	
2	IKM Pelayanan Pimpinan	-	-	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik			Sangat Baik	Sangat Baik	
3	% Sarana dan Prasarana yang Berkualitas Baik	-	-	87%	89%	91%	93%			91%	93%	
4	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	-	-	BB	BB	BB	BB	BB		BB	BB	
5	% Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan	-	-	95%	95%	95%	95%	87.66%		95%	95%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Mencermati permasalahan dan telaahan terhadap tugas pokok dan fungsi, maka dirumuskan beberapa isu strategis yang terkait, antara lain:

1. Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik menjadi fokus perhatian pemerintah daerah saat ini karena besarnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Dalam hal ini, Biro Umum memiliki peran yang strategis dalam memberikan atau memfasilitasi kegiatan Pimpinan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.
2. Sejalan dengan arah pembangunan daerah pada periode RPJMD ke-III (2016-2021) yang diarahkan pada peningkatan daya saing daerah, serta agar dapat memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai serta SDM pelayanan yang handal, maka Biro Umum memiliki peran strategis :sebagai yang terdepan dalam:
 - a. Terdepan dalam Pelayanan Pimpinan terkait dengan pengendalian internal guna mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.
 - b. Terdepan dalam memberikan pelayanan kepada tamu Pemda dan tamu Pimpinan. Untuk itu perlu menyikapinya dengan melakukan penguatan kapasitas SDM Biro Umum.
3. Salah satu faktor penting dalam membangun citra dan reputasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ditingkat nasional maupun internasional, yang ditandai dengan dibukanya Masyarakat Ekonomi Asean 2015, perlu meningkatkan daya saing daerah. Untuk itu, perlu mewujudkan pelayanan public yang prima dengan fokus perhatian kepada peningkatan kepercayaan public yang

secara tidak langsung kesan yang baik tersebut akan menyebar secara utuh.

Tantangan dan peluang merupakan faktor eksternal yang akan mempengaruhi organisasi dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapainya. Biro Umum sebagai unit pendukung pelayanan pimpinan dan kesekretariatan kedepannya akan menghadapi tantangan yang cukup berat dalam memberikan dukungan terhadap kesuksesan tugas-tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah, dimana intensitas kunjungan kerja Pimpinan semakin tinggi dan intensitas kunjungan tamu yang juga semakin tinggi dan sulit diprediksi. Semakin tingginya intensitas pekerjaan yang dihadapi akan tetapi struktur organisasi justru mengecil, seolah menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, tantangan juga akan datang dari aspek pelayanan publik yang semakin menuntut standar pelayanan prima. Sehingga faktor kualitas SDM dan Sarana dan Prasarana menjadi dua aspek yang harus diperhatikan.

Berperan sebagai *supporting unit* Pelayanan Tamu dan Pelayanan Pimpinan, Biro Umum turut mengembangkan inovasi di bidang pelayanan publik, diantaranya adalah peminjaman fasilitas gedung, ruang rapat, kendaraan dinas dan ruang teleconference yang dapat diajukan permohonannya secara online. Pengembangan pelayanan fasilitas ini dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah (PAD). Selain itu, inovasi pada pelayanan internal dapat berupa mekanisme verifikasi administrasi pencairan dana melalui tim verifikasi, penggunaan sistem pengarsipan administrasi kegiatan di tingkat bagian/subbagian, penggunaan system register pemakaian BBM, sistem informasi penatausahaan BMD Lingkup Setda, serta system informasi rencana kebutuhan BMD Lingkup Setda.

Peluang pengembangan pelayanan Pimpinan oleh Biro Umum dapat berupa: pertama, revitalisasi sistem pengendalian internal oleh

Gubernur. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan efektivitas kontrol internal oleh Gubernur kepada Perangkat Daerah dan instansi lainnya di daerah, dengan menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi setiap bulannya. Kedua, revitalisasi system pengendalian internal oleh Wakil Gubernur dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan efektivitas kontrol internal oleh Wakil Gubernur kepada Perangkat Daerah terkait dalam rangka perannya sebagai Ketua Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

Hambatan yang dihadapi oleh Biro Umum dalam pengembangan pelayanan ini datang dari aspek SDM yang masih kurang dari segi kualitasnya. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat penerapan budaya kerja seperti belum terlihatnya pelayanan yang ramah dari aparaturnya serta belum maksimalnya rancangan dan implementasi prosedur pelayanan tamu.

Dari uraian di atas, maka peta strategi dan scope kebijakan Biro Umum kedepannya dapat difokuskan kepada *Pertama, **Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pelayanan Tamu dan Pimpinan**; Kedua, **Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik***. Sedangkan kebijakan-kebijakan administrasi umum lainnya merupakan upaya Biro Umum sebagai lini pendukung kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan rekomendasi dan catatan strategis dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2020 yaitu:

1. Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana melalui pengadaan barang dan jasa dan pemeliharaan sarpras yang dapat mendukung pelayanan Biro Umum, utamanya fasilitas pada beberapa gedung/asset yang dikelola serta sarana dan prasarana untuk kebutuhan Pimpinan.

2. Meningkatkan daya dukung personil melalui rekrutmen tenaga khusus yang dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan pelayanan Biro Umum.
3. Meningkatkan dukungan teknologi pada pelayanan Biro Umum seperti SiMiraSimpel, SisPensu, SiPintas dan lain-lain.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Biro Umum pada 7 (tujuh) layanan unggulan Biro Umum, yaitu Pelayanan VIP Room Bandara Internasional Minangkabau, Pelayanan Keprotokolan, Pelayanan Ruang Pertemuan, Pelayanan Penginapan di Istana Bung Hatta, Pelayanan Peminjaman Kendaraan dan Fasilitas Kedinasan, Pelayanan Penerimaan dan Pendistribusian Surat, dan Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Membayar.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Memperhatikan rumusan program dan besaran pagu indikatif pada rancangan awal RKPD Tahun 2020, dan membandingkannya dengan hasil analisis kebutuhan anggaran Tahun 2020, dapat dilihat bahwa 8 (delapan) program yang direncanakan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun besaran pagu indikatif setiap programnya berbeda cukup jauh.

Jumlah dana yang diindikasikan pada RKPD jauh lebih kecil dari hasil analisis kebutuhan perangkat daerah. Total pagu indikatif RKPD sebesar **Rp. 57,736 milyar** sedangkan hasil analisis kebutuhan sebesar **Rp. 76,208 milyar**. Selisih kekurangan pagu dana mencapai **Rp. 18,472 milyar** atau butuh penambahan **32%** dari rancangan awal.

Penambahan ini didasarkan pada kebutuhan perhelatan acara nasional yang diadakan di Sumatera Barat pada Tahun 2020, yaitu MTQ Nasional, HARGANAS dan Rakor Gubernur se-Indonesia.

Kemudian, ada pembangunan fisik gedung serba guna Pemprov di Padang Baru dan pembangunan Rumah Ex. Pembantu Gubernur Wilayah II Bukittinggi yang telah lama terbengkalai yang akan dijadikan wisma. Selain itu, ada penambahan kegiatan Pengelolaan Pemakaian Mess Bukit Lampu yang merupakan kebutuhan operasional Mess di Bukit Lampu yang diharapkan dapat menambah PAD. Penambahan kebutuhan lainnya merupakan analisis kebutuhan biaya belanja rutin yang setiap tahunnya selalu meningkat, seperti kenaikan tarif listrik PLN, tarif PDAM, telfon, kenaikan beban operasional dan pemeliharaan gedung kantor serta sarana lainnya, sampai kepada kenaikan belanja rumah tangga pimpinan dan Tamu Pemda.

Hasil review rancangan awal RKPD Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Provinsi Sumatera Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Padang	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	16.944	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Padang	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	30.807	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Padang	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100%	30.549	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Padang	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100%	27.547	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kota Padang	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	100%	764	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kota Padang	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	100%	773	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kota Padang	Terpenuhinya peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%	164	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kota Padang	Terpenuhinya peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%	130	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kota Padang	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD	100%	517	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kota Padang	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD	100%	875	

6	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	Kota Padang	Terpenuhinya penyediaan jasa pelayanan tamu pemerintah daerah	100%	7.539	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	Kota Padang	Terpenuhinya penyediaan jasa pelayanan tamu pemerintah daerah	100%	14.281	
7	Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	Kota Padang	Tingkat pelayanan keprotokolan	100%	1.007	Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	Kota Padang	Tingkat pelayanan keprotokolan	100%	797	
8	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Padang	Tingkat pengelolaan keuangan daerah pada unit kerja SKPD	100%	251	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Padang	Tingkat pengelolaan keuangan daerah pada unit kerja SKPD	100%	999	
	Jumlah				57.736					76.208	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.5
Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020

Perangkat Daerah: Biro Umum Setda

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Setelah mencermati kebijakan nasional yang berkaitan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki program yang berkaitan dengan kebijakan nasional, karena fungsi Biro Umum yang merupakan fungsi penunjang/*supporting unit* pada sekretariat daerah dan bukan Perangkat Daerah teknis.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan arah atau kondisi akhir yang diharapkan yang akan diwujudkan atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Pada Tahun 2020, ditetapkan 3 (tiga) Sasaran dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja Biro Umum. Sasaran 1 “Meningkatnya Kepuasan Stakeholders di bidang Pelayanan Tamu dan Pelayanan Pimpinan” diukur dengan 2 (dua) indikator, yaitu “IKM Pelayanan Tamu” dan “IKM Pelayanan Pimpinan”. Sasaran 2 “Meningkatnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang Baik” diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu “Persentase Sarana dan Prasarana yang Berkualitas Baik”. Sedangkan Sasaran 3 “Terwujudnya Tata Kelola Organisasi” diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu, “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” dan “Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan”.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja 2020 Biro Umum

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET			KET
					2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Biro Umum	Meningkatnya Kepuasan <i>Stakeholders</i> di bidang Pelayanan Tamu dan Pelayanan Pimpinan	IKM Pelayanan Tamu	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
				IKM Pelayanan Pimpinan	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
			Meningkatnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang Baik	% Sarana dan Prasarana yang Berkualitas Baik	89%	91%	93%	
			Terwujudnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	
				% Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan	95%	95%	95%	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”, serta penjabaran dari Misi ke-2 “Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional”, pada Tujuan Ketiga “Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima, Transparan, Aspiratif, dan Partisipatif”, Sasaran Pertama “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”, dengan Indikator Kinerja “Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat”.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Biro Umum serta rumusan tujuan dan sasaran yang telah diuraikan pada Renstra Perubahan Biro Umum 2016-2021, dan mencermati hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, maka dirumuskan **8 (delapan) program** dengan **44 (empat puluh empat) kegiatan** yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020.

Pelaksanaan 8 (delapan) program dan 44 (empat puluh empat) kegiatan tersebut, digulirkan untuk menunjang fungsi utama Biro Umum sebagai yang terdepan dalam Pelayanan Tamu Pemda dan Pelayanan Pimpinan serta Kesekretariatan. Semua kegiatan akan dilaksanakan di Kota Padang, namun demikian sebagian pekerjaan fisik seperti pembangunan atau rehabilitasi gedung milik Biro Umum, ada yang berada di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Bukittinggi.

Dana yang dibutuhkan untuk menjalankan 8 program dan 44 kegiatan pada Tahun 2020 sebesar **Rp. 57.736.000.000,-**. Jumlah tersebut meningkat **98%** dari pagu dana Tahun 2019 yang sebesar **Rp.38.494.435.217,-**.

Program dan kegiatan beserta rencana target kinerja dan anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 beserta Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
Dan Perkiraan Maju Tahun 2021
Provinsi Sumatera Barat
(Rp.)

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.00	NON URUSAN								
4.00	01 FUNGSI LAINNYA								
4.00	01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	28.472.649.366			100%	31.319.914.303
4.00	01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Kota Padang	3000 buah	679.591.794	APBD		1650 buah	759,258,500
4.00	01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Kebutuhan listrik, air dan telekomunikasi OPD yang terpenuhi	Kota Padang	12 bulan	4.839.179.760	APBD		12 bulan	3,003,000,000
4.00	01 01 03 Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	Jumlah Unit gedung kantor, jasa sopir kantor terpenuhi, jasa pengamanan kantor terpenuhi	Kota Padang	8 unit/12 bulan, 60 orang/12 bulan	4.853.382.590	APBD		8 unit/12 bulan, 60 orang/12 bulan	5,128,931,500
4.00	01 01 06 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung kantor dan kendaraan dinas yang diasuransikan	Kota Padang	67 unit/12 bulan	482.250.000	APBD		67 unit/12 bulan	530,475,000
4.00	01 01 08 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor	Kota Padang	1 Tahun	391.472.239	APBD		1 Tahun	213,878,500

4.00	01	01	09	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kota Padang	1 Tahun	387.923.810	APBD		1 Tahun	306,053,000
4.00	01	01	10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan komponen instalasi listrik atau bangunan kantor yang tersedia	Kota Padang	1 Tahun	56.175.429	APBD		1 Tahun	54,488,500
4.00	01	01	11	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya jasa peralatan perlengkapan kantor	Kota Padang	12 Bulan	4.385.124.410	APBD		12 Bulan	10,557,943,000
4.00	01	01	13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	kebutuhan buku KDH, WKDH dan Setda terpenuhi	Kota Padang	2 jenis	49.000.000	APBD		2 jenis	26,950,000
4.00	01	01	14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan bahan kebersihan kantor	Kota Padang	12 Bulan	124.531.000	APBD		12 Bulan	136,984,100
4.00	01	01	15	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang diikuti	Kota Padang	1 Tahun	11.442.250.000	APBD		1 Tahun	12,586,475,000
4.00	01	01	18	Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Jumlah Senam pagi bersama di kantor	Kota Padang	44 kali / 12 bulan	472.990.642	APBD		44 kali / 12 bulan	383,986,900
4.00	01	01	24	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah rapat/pertemuan yang diselenggarakan	Kota Padang	82 kali	133.777.692	APBD		82 kali	61,803,500
4.00	01	01	32	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	KDH/WKDH yang mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan	Kota Padang	2 orang / 12 bulan	175.000.000	APBD		2 orang / 12 bulan	137,500,000

4.00	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR	Persentase berfungsi sarana dan prasarana aparatur		100%	14.422.205.783			100%	15.864.426.361	
4.00	01	02	01	Pengadaan Meubeler	Meja dan Kursi Kerja, Lemari Arsip, Kursi dan Meja Tamu	Kota Padang	7 item	716.482.600	APBD		7 item	788.130.860
4.00	01	02	04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi, Alat Informasi	Peralatan studio, komunikasi dan informasi yang terpelihara	Kota Padang	12 bulan	297.366.440	APBD		12 bulan	327.103.084
4.00	01	02	05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	Kota Padang	6 unit / tahun	421.870.204	APBD		6 unit / tahun	464.057.224
4.00	01	02	06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Kota Padang	50 unit roda empat, 15 unit roda dua	867.700.000	APBD		50 unit roda empat, 15 unit roda dua	954.470.000
4.00	01	02	07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	Kota Padang	14 jenis	376.731.307	APBD		14 jenis	414.404.438
4.00	01	02	09	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Jumlah Komputer dan jaringan komputer yang terpelihara	Kota Padang	39 unit	55.000.000	APBD		39 unit	60.500.000
4.00	01	02	19	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang direhab sedang/berat	Kota Padang	3 unit / tahun	704.494.799	APBD		3 unit / tahun	774.944.279
4.00	01	02	23	Pemeliharaan Rutin Berkala Instalasi dan Jaringan	Instalasi dan jaringan kantor yang terpelihara	Kota Padang	12 bulan	801.499.700	APBD		12 bulan	881.649.670
4.00	01	02	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil jabatan yang terpelihara	Kota Padang	10 unit	320.739.605	APBD		10 unit	352.813.566
4.00	01	02	37	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/Operasional terpenuhi	Kota Padang	6 unit	2.058.091.000	APBD		6 unit	2.263.900.100
4.00	03	02	43	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	Jenis perlengkapan/peralatan rumah jabatan/dinas/mess	Kota Padang	14 jenis	2.040.128.000	APBD		14 jenis	2.244.140.800

4.00	01	02	15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Rumah jabatan yang terpelihara	Kota Padang	2 unit	215.000.000	APBD		3 unit	236.500.000
4.00	01	02	16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Mess	Rumah dinas, mess yang terpelihara	Kota Padang	1 unit	155.000.000	APBD		3 unit	170.500.000
4.00	01	02	62	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/ Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jenis peralatan/perlengkapan rumah jabatan/ dinas/ mess yang dipelihara	Kota Padang	29 jenis	229.560.000	APBD		29 jenis	252.516.000
4.00	01	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Gedung kantor yang dibangun	Kota Padang	3 unit	4.265.396.600	APBD		3 unit	4.691.936.260
4.00	01	01	04	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Kota Padang	39 item	897.145.528	APBD		39 item	986.860.081
4.00	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas		100%	1.056.972.510			100%	1.162.669.761
4.00	01	03	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas PNS dan Non PNS	Kota Padang	616 stel	815.917.243	APBD		616 stel	897.508.967
4.00	01	03	11	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan	Kota Padang	85 stel	91.427.292	APBD		85 stel	100.570.021
4.00	01	03	12	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian dinas khusus yang disediakan	Kota Padang	49 stel	149.627.975	APBD		49 stel	164.590.773
4.00	01	04		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terpenuhinya peningkatan Sumber Daya Aparatur		100%	174.485.154			100%	191.933.669
4.00	01	04	01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	Kota Padang	44 orang	174.485.154	APBD		44 orang	191.933.669

4.00	01	05		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD		100%	731.854.236			100%	805.039.660
4.00	01	05	01	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Pelaksanaan Forum OPD, Rencana Kerja OPD, RKA-DPA OPD	Kota Padang	4 dokumen	79.454.000	APBD		4 dokumen	87.399.400
4.00	01	05	02	Penatausahaan Keuangan SKPD	Jumlah PA, KPA, PPK dan PPTK serta pengelola keuangan lainnya	Kota Padang	25 orang / 12 bulan	407.857.236	APBD		25 orang / 12 bulan	448.642.960
4.00	01	06	03	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Keuangan, LAKIP, LPPD, LKPJ, RKT, RENSTRA dan Capaian Kinerja Biro Umum	Kota Padang	7 dokumen	172.839.000	APBD		7 dokumen	190.122.900
4.00	01	02	11	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Jumlah pengelola asset	Kota Padang	5 Orang/ 12 bulan	71.704.000	APBD		5 Orang/ 12 bulan	78.874.400
4.00	01	158		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN	Terpenuhinya penyediaan jasa pelayanan tamu pemerintah daerah		100%	9.383.151.842			100%	10.321.467.026
4.00	01	158	01	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah	Jumlah tamu pemerintah daerah yang terlayani	Kota Padang	29.000 orang	8.629.948.178	APBD		30.000 orang	9.492.942.996
4.00	01	158	02	Peringatan Hari-hari Besar Nasional	Jumlah hari besar nasional yang diperingati	Kota Padang	7 Hari Besar Nasional	753.203.664	APBD		7 Hari Besar Nasional	828.524.030
4.00	01	180		PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat pelayanan keprotokolan		100%	981.707.093			100%	1.079.877.802
4.00	01	180	01	Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	Jumlah Tenaga honor protokol yang terbayarkan jasanya; Terlaksananya keprotokolan Pemprov Sumbar	Kota Padang	16 orang / 12 bulan	916.383.145	APBD		16 orang / 12 bulan	1.008.021.460
4.00	01	180	03	Rakor Keprotokolan	Jumlah peserta rakor	Kota Padang	60 orang	65.323.948	APBD		60 orang	71.856.343

4.00	01	185		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat pengelolaan keuangan daerah pada unit SKPD		100%	2.512.974.016			100%	2.764.271.418
4.00	01	185	01	Pengelolaan Pemakaian Istana Bung Hatta	Terpenuhinya kebutuhan pengelolaan gedung Istana Bung Hatta	Kota Padang	12 Bulan	1.338.450.684	APBD		12 Bulan	1.472.295.752
4.00	01	185	02	Pengelolaan Pemakaian Gedung Rohana Kudus	Terpenuhinya kebutuhan pengelolaan gedung Rohana Kudus	Kota Padang	12 Bulan	799.694.006	APBD		12 Bulan	879.663.407
4.00	01	185	03	Pengelolaan Pemakaian Mess Bukit Lampu	Terpenuhinya kebutuhan pengelolaan Mess Bukit Lampu	Kota Padang	12 Bulan	374.829.326	APBD		12 Bulan	412.312.259
				Jumlah				57.736.000.000				63.509.600.000

Padang, Maret 2019
KEPALA BIRO UMUM,

Drs. HERZADI L.
Pembina Utama Muda,
NIP. 19621201 198903 1 012

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 merupakan pedoman bagi seluruh Bagian pada Biro Umum dalam merencanakan dan melaksanakan program kegiatan agar memiliki satu persepsi yang sama tentang tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dengan demikian pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dapat tercapai dengan hasil yang optimal.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat. Karenanya, untuk mencapai keberhasilan tersebut perlu didukung oleh anggaran, SDM yang profesional dan sarana prasarana yang memadai.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Biro Umum tahun 2020 ini disusun untuk memberi gambaran tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

Padang, Maret 2019

KEPALA BIRO UMUM,

Drs. HERZADI L.

Pembina Utama Muda,
NIP. 19621201 198903 1 012